

## IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU (STUDI KASUS MODERASI BERAGAMA) DI SMK PARIWISATA TRIATMA JAYA SINGARAJA

Putu Rhoma Arsana<sup>1)</sup>, I Putu Gede Parmajaya<sup>2)</sup>, Ni Luh Gede Hadriani<sup>3)</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja,  
E-mail: [rhomaarsana82@gmail.com](mailto:rhomaarsana82@gmail.com)<sup>1)</sup>, [pandeparma59@gmail.com](mailto:pandeparma59@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[luhgedehadriani@gmail.com](mailto:luhgedehadriani@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*The objectives of this study are to (1) describe how Hindu religious education learning are implemented at the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School, and (2) describe the efforts made to implement Hindu Religious Education learning at the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School. (3) To discuss the challenges encountered in adopting the Hindu Religious Education learning at the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School.*

*The research was conducted at the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School, and the methods employed in this study were (1) the place and location of the research, meaning the research was conducted at the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School, and (2) (2) Research methods and methodologies, (3) Research data types and sources (4 ) Informant gathering approaches, (5) Data gathering strategies, such as observation, openinterviews ( endedOpen ended ), documentation studies, etc. (6) Research tools, (7) Data validity assessment methods, and (8) Data analysis methods*

*Because the Triatma Jaya Singaraja Tourism Vocational School has religious (Christian) characteristics, the results showed that (1) the Hindu Religious Education learning pattern and system had been implemented in the form of theory and practice, but teachers still had difficulty developing Hindu Religious Education learning. (2) Efforts are undertaken to implement Hindu Religious Education learning, with temples Dalem and Taman being chosen as sites or venues for developing Hindu Religious Education learning. at this time, through preparing and teaching in the form of lesson plans, in the form of dharmawacana or lectures, in the form of dharmatula or online live debates Dharmagita, dharmayatra, and forgiving one another are all terms used in Buddhism. (3) Obstacles to implementing the Hindu Religious Education learning system at the Triatma Jaya Singaraja tourism vocational school include a shortage of Hindu religious learning resources (media, books) and religious students' access to places of worship (temples, pelangkiran). Hindu.*

**Keywords:** Moderation, Hindu Religious Education

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya.

Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental atau moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di

sekolah, nonformal dalam keluarga serta informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk religius (*homo religiousus*), di lain pihak pemenuhan objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja selama ini sudah berjalan, sesuai sekolah-sekolah di Indonesia dengan memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran 'wajib', harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memunculkan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika. Melalui pendidikan di sekolah (formal) akan terbentuk manusia yang susila, bermoral, kreatif, serta diharapkan anak didik akan mampu menghadapi berbagai masalah kehidupan, sebab, manusia umumnya akan mengalami suatu fase-fase perkembangan yang menuntut kesiapan mental untuk menghadapinya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah menyadarkan siswa untuk secara otomatis terdorong untuk mengetahui hukum tentang agama. Jangan sampai pengetahuan dan pengertian siswa tentang agama hanya sekedar pengetahuan yang tidak berpengaruh

apa-apa dalam kehidupan mereka setiap harinya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan Nasional telah menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkelanjutan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, ( diakses di google.com tahun 2020), mengamanatkan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban menyediakan atau mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta.

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003, pasal 55 menegaskan: "Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat." Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan

merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Hal mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Kebebasan beragama merupakan HAM dan HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti

menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain.

Jadi kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang.

Dalam sejarah dan data pendidikan di Indonesia, persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, ataupun personal dan organisasi begitu banyak jumlahnya, melebihi sekolah-sekolah negeri yang ada, dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban memperhatikan keberadaan sekolah swasta sama dengan sekolah negeri, termasuk perlakuan terhadap pelajaran agama. Bukan suatu keniscayaan di sekolah swasta umum dengan ciri khas keagamaan tertentu, pelajaran agama diberikan untuk semua siswa sesuai dengan agamanya, dan oleh guru agama yang seagama. Selama ini masih berlaku sekolah dengan basis keagamaan hanya memberikan pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tertentu. Di sekolah negeri tidak menjadi persoalan, akan tetapi menjadi suatu masalah pada sekolah swasta, dikarenakan ada beberapa sekolah swasta menerapkan ciri khas keagamaan tertentu dalam pembelajaran. Walaupun

pemerintah belum sepenuhnya secara merata menyediakan pengajar, sumber belajar, dan fasilitas belajar yang memadai.

Hal ini terjadi pada pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja. Secara juridis formal, pembelajaran pendidikan agama hindu di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja secara bertahap semakin mendapatkan posisi yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, namun demikian, secara faktual pembelajaran Pendidikan Agama Hindu yang telah dilakukan di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja dianggap belum optimal atau belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan pada pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, diantaranya dalam hal penyediaan sarana atau fasilitas belajar, sarana ibadah, sumber belajar, pelayanan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian sikap, moral, dan budi pekerti dalam diri siswa.

Walaupun posisi Pendidikan Agama Hindu pada sekolah demikian kuat, akan tetapi masih terdengar adanya sorotan atau kritikan masyarakat terhadap implementasi dan implikasinya pada kehidupan sosial di sekitarnya. Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak hanya menawarkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaan. Seperti SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja merupakan sekolah swasta umum yang secara faktual merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan (Kristen). Hal ini, dapat terlihat bahwa SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja berada dibawah Yayasan Triatma Surya Jaya yang merupakan yayasan Kristen. Akan tetapi sekolah tidak berhak mewajibkan siswa-siswanya dari agama lain mengikuti pelajaran agama sesuai

dengan ciri khas keagamaan sekolah yang bersangkutan. Misalnya sekolah tidak berhak mewajibkan atau menekan orangtua untuk mengizinkan anak mereka yang bukan Kristiani mengikuti pelajaran agama Kristen. Dalam konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama, pendirian orangtua mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya pluralisme. Sehingga tidak menjadi masalah, kalau sekolah dengan basis keagamaan tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain. Nilai-nilai pluralitas dapat berkembang yang pada akhirnya dihindari perilaku fanatisme sempit, bahkan dapat dihindari perilaku radikalisme keagamaan.

Sistem ini bukan merupakan suatu kemunduran atau ancaman. Akan tetapi justru merupakan suatu langkah bijaksana dan maju menuju sikap beriman yang inklusif dalam suatu tatanan komunitas beriman yang sejati. Sekolah swasta umum dengan ciri khas keagamaan memiliki hak otonomi untuk menentukan ataupun menerima guru agama yang akan mengampu mata pelajaran agama. Misalnya sekolah kristen menerima guru agama Islam, Kristen, Hindhu, dan Budha. Demikian sebaliknya. Sekolah berhak menilai dan membina serta memperhatikan isi (konten) materi pelajaran yang diberikan. Kepentingan sekolah swasta keagamaan adalah guru agama tersebut berwawasan inklusif, humanis, memenuhi kecerdasan yang memadai dan membantu proses pembentukan sikap dan perilaku hidup keagamaan dan kemanusiaan para siswa. Sekolah memastikan terjaminnya isi ajaran dan proses pembelajaran agama mendorong pembentukan sikap dan perilaku nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang

dibutuhkan untuk kesejahteraan dan ketenteraman hidup bersama.

Terkait dengan penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu yang berada di dalam sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan dan berdiri ditengah-tengah derasnya arus modernisasi dan kondisi siswa yang multikultur di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja, kondisi ini tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh pada karakter dan sarana serta sumber pembelajaran Pendidikan Agama Hindu yang ada pada SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja itu sendiri. Serta pemahaman tentang pembelajaran Pendidikan Agama Hindu belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti melalui penelitian dengan judul “Implimentasi Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu (Studi Kasus Moderasi Beragama di SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja).

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap objek penelitian, maka berikut diuraikan tentang :

#### **2.1.1 Sejarah SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja**

SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah menengah kejuruan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, mempunyai program untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten dibidangnya. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, sekolah melaksanakan program praktik produktif setiap minggunya, dengan didukung oleh tenaga pengajar, fasilitas dan materi praktik yang disesuaikan dengan keperluan industri. SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, yang terletak di

jalan Singaraja – Seririt, Desa Anturan – Lovina Singaraja. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, yang mengemban misi untuk melaksanakan pendidikan tingkat menengah kejuruan dan meningkatkan mutu tamatan pendidikan tingkat menengah kejuruan.

SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja memfokuskan diri pada proses pembelajaran diimbangi dengan pendekatan terhadap disiplin, kegiatan pembiasaan, dan perhatian terhadap semua aspek yang mendukung proses pembelajaran. SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja mempunyai aturan yang mengatur tingkah laku yang mempersyaratkan kepada semua warga sekolah untuk menerima tanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka, menjaga sikap yang baik, yang menunjukkan rasa saling hormat menghormati satu dengan lainnya. Dalam mempersiapkan tugas penting tersebut, SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja telah melaksanakan kegiatan ini pada bidang akademis dan non akademis.

Pada bidang akademis masing-masing mata pelajaran saling memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pembentukan jati diri siswa sejak dini sehingga siswa dapat menentukan kemana akan bekerja atau melanjutkan setelah menyelesaikan pendidikan di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja. Sejuah ini lulusan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja telah bekerja di DU/DI dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Bali maupun di Provinsi lainnya. SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sekarang kurikulum SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja sudah mengalami perkembangan dengan menerapkan kurikulum 2013 revisi, dengan pendekatan CTL (*Contextual Teaching and learning*).

Pada Tahun Pelajaran 2006/2007 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja tetap meyenggarakan program keahlian Akomodasi Perhotelan dan Tata Boga, dengan usaha dan promosi sekolah serta kerjasama tim yang solid maka kedua program keahlian baik Akomodasi Perhotelan maupun Tata Boga mendapatkan siswa. Dengan perolehan jumlah siswa baru secara menyeluruh sebanyak 186 orang (peningkatan 136%). Program Keahlian Tata Boga sebanyak 125 siswa (2 rombongan belajar) dan Program Keahlian Akomodasi Perhotelan, sebanyak 61 siswa (2 rombongan belajar). Pada tahun pelajaran 2007/2008 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, jumlah siswa yang diterima pada tahun ini 317 siswa (peningkatan 321%). Mengalami peningkatan jumlah siswa yang ingin bersekolah di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja. kemudian pada tahun pelajaran 2008/2009 SMK Pariwisata Triatma Jaya kembali mengalami peningkatan jumlah siswa, sebanyak 321 siswa. Berikutnya pada tahun pelajaran 2009/2010 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja menerima siswa baru sebanyak 331 siswa. Tahun pelajaran 2010/2011 jumlah siswa SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan adalah 340 siswa. Tahun pelajaran 2011/2012 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja

menerima siswa baru sebanyak 357 siswa. Tahun pelajaran 2012/2013 jumlah siswa SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan adalah 362 siswa. Tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswa SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan adalah 386 siswa. Pada tahun pelajaran 2014/2015 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja menerima siswa baru sebanyak 390 siswa. Tahun pelajaran 2015/2016 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan mendapatkan siswa sebanyak 446 siswa. Tahun pelajaran 2016/2017 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan mendapatk siswa sebanyak 746 siswa.

Tahun pelajaran 2017/2018 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan mendapatkan siswa sebanyak 786 siswa. Akan tetapi pada tahun pelajaran 2018/2019 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja mengalami penurunan dalam penerimaan siswa, dimana pada tahun pelajaran 2018/2019 SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan mendapatkan siswa sebanyak 726 siswa. Dan kembali pada tahun pelajaran 2019/2020 kembali mengalami penurunan dalam penerimaan siswa dimana SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja secara keseluruhan mendapatkan sebanyak 628 siswa. Begitu pula pada tahun pelajaran 2020/2021 secara keseluruhan mendapatkan siswa sebanyak 628 siswa. Dan pada tahun pelajaran 2021/2022 dimasa pandemi *covid-19* dimana terjadi keterpurukan dari berbagai sektor di Indonesia bahkan dunia secara umum, dan Bali ( Kabupaten Buleleng ) secara khusus serta keinginan masyarakat yang lebih cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah Negeri oleh karena itu pada tahun pelajaran 2021/2022, SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja

kembali mengalami penurunan dalam penerimaan siswa, dimana secara keseluruhan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja mendapatkan siswa sebanyak 441 siswa.

Walaupun mengalami penurunan dalam penerimaan jumlah siswa akan tetapi SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja tetap memberikan pelayanan terbaik dalam pembelajaran baik pembelajaran *daring* ( *virtual* ) maupun *luring* terhadap para siswa. Hal ini dibuktikan dengan komitmennya SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja menjaga kualitas dan mutu pendidikan, seperti komitmen dalam menerapkan sistem manajemen pendidikan yang terkontrol melalui sistem manajemen ISO : 2015 dan sebagai sekolah penjamin mutu ( SPMI ) serta beberapa prestasi sudah mampu diraih baik di tingkat kabupaten, maupun di tingkat provinsi bahkan nasional.

### **2.1.2 Letak Geografis SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja**

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja. Secara singkat dalam gambaran umum lokasi penelitian pada suatu sekolah sering kali dideskripsikan mengenai keberadaan sekolah yang bersangkutan yang disajikan sebagai tahap awal sebelum memasuki kajian intinya. Pada penelitian ilmiah ini, penyajian data tentang keberadaan gambaran umum lokasi penelitian diharapkan dapat mendukung materi pokok dalam penelitian yang dilakukan, bagaimanapun juga penelitian tersebut dilaksanakan di sekolah tempat penelitian yang dilakukan, paling tidak dapat menggambarkan keadaan sekolah yang diteliti. SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja letaknya sangat strategis karena terletak dikawasan atau *central* pariwisata Lovina jarak SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dengan pusat

pemerintahan kecamatan hanya 7 km, dan dengan pusat pemerintahan kota administrasi sekitar 8 km. Sedangkan jarak SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dengan ibu kota provinsi Bali atau Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olah raga provinsi Bali kurang lebih 90 km, serta jarak antara SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dengan Yayasan Triatma Surya Jaya kurang lebih 80 Km.. Dengan demikian warga sekolah tidak terlalu menjadi hambatan untuk menuju ke pusat kota pemerintahan maupun ke Yayasan Triatma Surya Jaya. Apalagi didukung dengan adanya sarana transportasi yang cukup memadai. Dilihat dari sistem manajemen pendidikan, SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dapat diuraikan dalam jumlah siswa, guru dan kepegawaian.

### **2.2 Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja**

Sebelum terjadi covid-19 proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja bersifat langsung, yakni proses pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran ( penilaian). Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis.

Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional*

*effect*. Selain itu proses pembelajaran langsung bersifat tatap muka melalui adanya interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Akan tetapi perubahan terjadi ketika covid-19 melanda pada segenap aspek kehidupan termasuk merambah pada aspek pendidikan. Proses pembelajaran tidak langsung pun mulai diterapkan. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap. Pembelajaran tidak langsung saat covid-19 banyak menggunakan media teknologi. Guru dituntut menguasai IT dalam mengembangkan pembelajarannya. Pembelajaran seperti ini disebut *e-learning*. yang dapat dikembangkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ), Penilaian Jarak Jauh ( PNJJ ), Remedial Jarak Jauh ( RJJ ), Pengayaan Jarak Jauh ( PGJJ ).

### **2.3 Upaya-upaya Yang Dilaksanakan Dalam Menerapkan Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja**

Dalam menerapkan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, guru harus memiliki kreatifitas dan unsur-unsur kebutuhan dalam mengembangkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Hal ini dikarenakan SMK pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan ( Kristen ). Unsur – unsur kebutuhan yang dimaksud adalah (1) Kebutuhan akan rasa kasih sayang : yaitu kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih, (2) Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan yang mendorong manusia mengharapkan adanya perlindungan, (3) Kebutuhan akan rasa harga diri yaitu suatu kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia dihormati dan dihargai oleh orang lain, (4) Kebutuhan akan rasa bebas yaitu suatu kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas, untuk mencapai kondisi dan situasi rasa lega, (5) Kebutuhan akan rasa sukses yaitu kebutuhan manusia yang menyebabkan ia mendapatkan rasa keinginan untuk dibina dalam bentuk penghargaan terhadap hasil karyanya, (6) Kebutuhan akan rasa ingin tahu (menengal) yaitu kebutuhan yang menyebabkan manusia selalu meneliti dan menyelidiki sesuatu. Selanjutnya gabungan dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama. Melalui agama kebutuhan – kebutuhan tersebut dapat disalurkan. Seperti kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, rasa bebas, rasa sukses dan rasa ingin tahu akan terpenuhi.

#### **2.3.1 Perencanaan Pembelajaran**

Sebelum adanya upaya secara teori dan praktek dalam mengajar Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, seorang guru Pendidikan Agama Hindu



harus sudah memiliki pegangan berupa perencanaan pembelajaran. Rencana guru harus mengikuti perencanaan lembaga dan Kurikulum yang sudah disusun serta diterapkan di sekolah. Seperti yang disampaikan salah seorang guru Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, Efik Tresnawati, Sos.H, Wawancara, (Kamis,30 Juli 2021). “Menjelaskan bahwa “SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja memiliki perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, yang sudah tersusun berdasarkan Kurikulum 2013 (K 13), yang diterapkan. Nantinya dari perencanaan ini menjadi acuan serta merancang sebuah persiapan pembelajaran bagi guru dalam menjabarkan perencanaan pembelajarannya”.

Berdasarkan penjelasan informan, di pertegas kembali dari pendapat sumber lain. Seperti halnya dalam pendapat Pidarta (1998) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat organisasi tetap berdiri tegak dan maju. Sebagai suatu sistem dalam tenunan supra sistem yang selalu berubah, artinya bagaimana organisasi pendidikan dapat mengikuti dan mengendalikan perubahan masyarakat yang demikian dinamis, menuntut suatu perencanaan yang matang. Pendapat Pidarta di atas diperkuat oleh pendapat Amirullah, (2000) dinyatakan bahwa pada hakekatnya perencanaan adalah proses mewujudkan kondisi masa depan yang dicita-citakan beserta seluruh langkah-langkah yang diperlukan, melalui kegiatan masa kini. Artinya dengan perencanaan, masa depan tidak kita biarkan terjadi secara kebetulan begitu saja, namun kita wujudkan sebagai hasil kegiatan saat sekarang melalui perencanaan.

Dipilihnya ruang kelas, dan aula sekolah, bahkan pura sebagai tempat

penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu secara teori maupun praktek, yang pelaksanaannya sudah tersusun dalam jadwal pembelajaran akan tetapi pelaksanaan pembelajaran belum dapat dilaksanakan sesuai harapan guru dan siswa. Hal ini dikarenakan SMK pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan ( Kristen ), dan berada di bawah Yayasan Triatma Surya Jaya (Yayasan Kristen). Oleh karena itu guru Pendidikan Agama Hindu menjadikan pura *Dalem* dan pura *Taman* sebagai tempat *alternatif* sekaligus sebagai salah satu upaya guru Pendidikan Agama Hindu.

Penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Priwisata Triatma Jaya Singaraja, yang dilaksanakan di pura *Dalem* dan pura *Taman*, hal ini dikarenakan kedua pura tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar dan dekat dengan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, memiliki lingkungan yang aman, bersih, asri dan mempunyai fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendekatan *scientific*, pada Kurikulum 2013 ( K13 ). Terutama terhadap sumber belajar. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatama Jaya Singaraja, adalah sebagai berikut: (1) Tujuan yang hendak dicapai, (2) Upaya memanfaatkan sumber daya yang ada, (3) Ada rasa tanggung jawab dalam kegiatan, (4) Ada pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan, (5) Ada kerja sama antar komponen untuk mencapai tujuan.

Berikut maksud dan tujuan penyelenggaraan serta pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu,

yang pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan di pura dalam dan pura taman, adalah sebagai berikut: (1) Untuk melengkapi dan mengimbangi pembelajaran Pendidikan Agama Hindu secara teori maupun praktek di kelas dan aula. (2) Untuk mengembangkan wawasan siswa yang beragama Hindu terhadap Pendidikan Agama Hindu. (3) Untuk memperdalam dan memperkaya ilmu pengetahuan Agama Hindu melalui pembelajaran teori dan praktek. (4) Menciptakan generasi penerus Hindu yang handal dan cerdas dalam hal Pendidikan Agama Hindu. (5) Melahirkan pemikiran siswa terhadap Pendidikan Agama Hindu dan mencintai Agama Hindu secara utuh, serta mempertahankan pembelajaran Agama Hindu sebagai pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran ahlak dan jiwa sejati. (6) Meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama siswa beragama Hindu dan meningkatkan persatuan dan rasa suka duka sesama siswa beragama Hindu secara khusus.

#### **2.4 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu Bagi Para Siswa di SMK Pariwisata Triatama Jaya Singaraja.**

##### **2.4.1 Kendala Sumber Belajar**

Sumber belajar yang direncanakan merupakan sumber yang dengan sengaja dirancang dan dikembangkan secara khusus sebagai komponen-komponen instruksional, agar terjadi interaksi pembelajaran yang formal guna mencapai tujuan yang instruksional. Seperti halnya seorang guru Pendidikan Agama Hindu yang mengajar peserta didik dengan pokok bahasan. Bersembahyang menjadi sub pokok bahasan yaitu “persiapan sembahyang”. Sumber belajar yang tersedia dapat dimanfaatkan adalah sumber belajar

yang telah tersedia yang dapat dirancang secara khusus untuk kepentingan belajar mengajar, tetapi dapat dijumpai, diubah dan dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran yang khusus dalam kegiatan belajar mengajar. Adanya komponen-komponen sumber belajar seperti pesan (informasi), masyarakat, bahan (modul atau buku Pendidikan Agama Hindu), peralatan, dan teknik atau metode merupakan sumber belajar utama dalam penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Yang nantinya terjadi *stimulus respon* antara pendidik dengan siswa dalam proses pembelajaran. Akan tetapi ketersediaan sumber belajar yang tersedia di SMK Pariwisata Triatama Jaya Singaraja dalam penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh salah seorang guru agama hindu di SMK Pariwisata Triatama Jaya Singaraja, Made Waca, SPd melalui wawancara (Kamis 30 Juli 2021). Menjelaskan bahwa guru agama hindu belum mampu secara maksimal dalam kegiatan proses belajar mengajar pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, dikarenakan terjadi batasan gerak dan batin guru dan siswa agama hindu dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, dikarenakan SMK Pariwisata Triatama Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan (Kristen).

##### **2.4.2 Kendala Fasilitas atau sarana (Tempat Ibadah)**

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental/moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan agama di

sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religiosus*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Made Waca, SPd melalui wawancara (Kamis 30 Juli 2021). Kembali menjelaskan bahwa : Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadikebutuhan setiap manusia. Dan menjadi suatu kewajiban bagi satuan Pendidikan untuk menjamin penyediaan tempat ibadah bagi setiap siswa dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, jumlah siswa mayoritas beragama Hindu. Tetapi keberadaan fasilitas berupa tempat ibadah seperti Pura atau *Pelangkiran* di ruang kelas bisa dikatakan tidak ada. Tetapi yang terdapat di ruang kelas adalah berupa *salib*, yang merupakan simbol dari Agama Kristen. Berbagai usulan akan keberadaan tempat ibadah berupa pura ataupun *pelangkiran* sudah dilakukan dari pihak orang tua siswa, guru Agama Hindu, kepada Kepala Sekolah, selanjutnya disampaikan ke yayasan. Usulan akan keberadaan fasilitas tempat ibadah seperti pura atau *pelangkiran*, sampai sekarang ini, sampai peneliti mengadakan penelitian fasilitas tempat ibadah pura maupun *pelangkiran* belum juga terealisasi ( tidak ada ).Tidak adanya tempat ibadah seperti pura maupun *pelangkiran* di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja menjadi kendala bagi pendidik dan siswa yang beragama Hindu untuk lebih memahami Pendidikan Agama Hindu. Terlebih dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu yang mengajarkan untuk memahami konsep keyakinan dan

kepercayaan terhadap keberadaan sang pencipta ( Tuhan ) Hindu pada sebuah simbol.

Pada wawancara dengan guru Pendidikan Agama Hindu, Waka Humas dan Kepala Sekolah ada beberapa pertimbangan berupa analisis pemikiran terhadap fasilitas tempat ibadah seperti pura atau *pelangkiran* yang tidak ada di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja. Disamping SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja sebagai sekolah memiliki ciri khas keagamaan ( Kristen ), diuraikan dalam kewajiban satuan pendidikan pada pokok pembahasan tentang kewajiban satuan pendidikan sebagai berikut: (a) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. (b) setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama, (c) satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau menyelenggarakan pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (d) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. (e) Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (f) satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan. (PP. 55/2007, pasal 4).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, sumber dan kroscek data,

maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, seperti *pelangiran* diruang kelas, *pelinggih* di area sekolah memang tidak ada. Hal ini dikarenakan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan (Kristen). Berbagai usulan atau langkah sudah dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini orang tua siswa, guru, siswa, masyarakat serta kepala sekolah, belum mendapatkan kebijakan atau persetujuan dari pihak yayasan. Disebutkan pula pada (PP.55/2007, pasal 4 bagian,( f ), menyatakan bahwa : satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **2.4.3 Kendala Pelayanan**

Di sekolah, setiap anak berhak mendapatkan pelajaran baik melalui intrakurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Terkait dengan kurikulum sistem pendidikan nasional menyatakan pentingnya memperhatikan aspek strategis seperti nilai-nilai religius-universal, kebudayaan, potensi daerah, potensi individu, minat dan bakat bahkan kepentingan nasional. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan

minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti termuat dalam Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dan secara terminologis, sistem pendidikan nasional merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Sebagai cerminan dari bentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang religius yang kemudian diadopsi secara konstitusional dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Pendidikan Agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan serangkaian ikhtiar yang sistematis dan sinergis dari berbagai pihak (orang tua, masyarakat,

pemerintah dan sekolah). Masing-masing pihak dapat menunaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki. Para orang tua dapat mengajarkan dan mendidik anak-anaknya di rumah, masyarakat dapat menyediakan fasilitas pengamalan ibadah sebagai bentuk pendidikan praktis kepada anak didik. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang kondusif bagi peserta didik dan masyarakat untuk mendalami dan mempelajari agama yang dianutnya. Dalam konteks Pendidikan Agama tanpa diskriminasi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Aturan tersebut diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yakni: Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Untuk mempertegas aturan tersebut, maka Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah. Di dalamnya secara *eksplisit* dinyatakan bahwa setiap sekolah berkewajiban menyediakan pelajaran

agama kepada siswa, dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan siswa. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka Pendidikan Agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah yang serumpun dengan sekolah induk. Atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya. Hal ini seperti informan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Desi Wulan Pertiwi, SPd, wawancara (Kamis 30 Juli 2021). Menjelaskan bahwa pelayanan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, seperti pelayanan kegiatan keagamaan (persembahyangan) guru Agama Hindu melaksanakan kegiatan persembahyangan sebagai konsep pemahaman pembelajaran Pendidikan Agama Hindu terhadap siswa secara teknik, sudah terlaksana tetapi belum secara maksimal. Hal ini dikarenakan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keamaan ( Kristen ). Hal ini yang menjadi masalah terhadap pelayanan terhadap siswa yang beragama Hindu. Dijelaskan bahwa SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dari segi jumlah

siswa merupakan mayoritas beragama Hindu, akan tetapi guru Pendidikan Agama Hindu belum mampu memberikan pelayanan yang sesuai terhadap siswa, terlebih pelayanan pada pelaksanaan praktek keagamaan, seperti pelaksanaan persembahyangan. Sehingga dalam layanan terhadap pelaksanaan persembahyangan guru Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja berinisiatif melaksanakan persembahyangan di pura *Dalem* maupun di pura *Taman*. Dan seijin Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat serta sepengetahuan Wakil Kepala sekolah Bidang kurikulum. Berdasarkan observasi, wawancara, dan sumber yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan pembelajaran khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, belum maksimal bahkan bertolak belakang dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yakni: Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya seagama. Dan bertolak belakang juga dengan Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Di dalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap sekolah berkewajiban menyediakan pelajaran agama kepada siswa, dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan siswa.

### III. KESIMPULAN

Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja belum mampu dilaksanakan secara maksimal, dimana antara siswa dan pendidik (guru

) masih ragu dalam melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Hal ini dikarenakan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan (Kristen). Oleh karena itu guru agama hindu mesti berkretifitas dan berinovasi dengan memberikan solusi dalam menerapkan pembelajaran agama hindu di lingkungan pura *Dalem* dan pura *Taman* milik Desa Adat Anturan. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam menerapkan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, diterapkan melalui pendekatan yang signifikan seperti Pendekatan *dharmawacana* ( Pendekatan pembelajaran untuk mendiskripsikan materi pembelajaran ), *dharmatula* (diskusi), *dharmayatra* (Perjalanan suci), *dharmasadhan*(prilaku darma dengan catur marga yoga), *dharmagitha*(Nyanyian suci), *dharmasanthi*(wujud toleransi).Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, berupa kendala sumber belajar dimana ketersediaan sumber belajar yang tersedia di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dalam penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu belum terlaksana secara maksimal. Dan pendidik belum mampu secara maksimal dalam kegiatan proses belajar mengajar pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Serta terjadi batasan gerak dan batin pendidik dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, hal ini dikarenakan SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja merupakan sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan ( Kristen ). Kemudian kendala pada fasilitas atau sarana ibadah, dimana ketersediaan fasilitas tempat ibadah seperti Pura dan *Pelangkiran* di ruang kelas bisa dikatakan tidak ada

.Serta kendala berupa kegiatan keagamaan pelayanan pembelajaran Pendidikan Agama di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja, belum secara maksimal dilaksanakan. Seperti pelaksanaan pembelajaran agama hindu secara teori di kelas serta praktek kegamaan, terhadap siswa beragama Hindu, Pelaksanaanya dilaksanakan di pura *Dalem* maupun di pura *Taman*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Daniel, E.C. 1991. *Biostatistic: Foundation for Analysis in the Health Science. Inc Canada*.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Dra. Hj. Su'adah, MSI dan Fauzik Lendryono, MSI. 2003. *Pengantar Psikologi*. Malang: Bayu Media Publishing dan UMM Press.
- Fanani, Achmad. 2009. *Kamus Istilah Populer*. Jogjakarta: Mitra Pelajar.
- Joesoef, Soelaman. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*. Jakarta, Bumi Aksara
- Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unel. 1990. *Discipline Without Shouting Or Spanking: Practical Solutions to the Most Common Preschool Behavior Problems*. New York: MJF Books.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Co.id/diakses pada tgl 23Oktober 2020.
- Mantik, Agus. 2007. *Tuntunan Pelaksanaan Paraman Kilat Kemah Sadhana*. Surabaya: PARAMITA.
- Margono, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial, Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Muchith, Sakhan. 2008. *Pembelajaran Kontekstual*. Semarang : RaSAIL.
- Moh. Surya. 1997. *Psokologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: PPB-IKIP Bandung.
- Mulyanti, Sri. 2013. *Perkembangan Psikologi Anak*. Yogyakarta: Laras Media Prima.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1994. *Jasmani dan Rohani Dalam Pendidikan Pra Sekolah*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurjanah, Nunuy. dkk. 2007. "Pelaporan Penelitian Kualitatif "(Kumpulan Makalah), Bandung: Program Pengembangan Bahasa S-3. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ngurah, I Gusti Made. 1998. *Buku Pendidikan Agama Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Nurkencana, Wayan. 2011. *Pokok-Pokok Ajaran Agama Hindu*. Denpasar : manikgeni.
- Parmajaya, dkk. 2016. "Seni-seni Sakral di Bali". Singaraja: P3M STAHN Mpu Kuturan Singaraja.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Diakses melalui Google. Com Tahun 2021

- Parmajaya, 2009. "Metodologi Pembelajaran Agama Hindu. Materi Kuliah. Denpasar" IHDN.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Diakses melalui Google.com Tahun 2020.
- Purwanto, Ngalim. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 56 Tahun 2014 tentang *Pendidikan keagamaan hindu*. Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Sagala, S. 2009. *Konsep dan makna pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Redana, Made, 2006. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dan Proposal Riset*, Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Sanjaya, Putu. 2011. *Filsafat Pendidikan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Sirtha, I Nyoman. 2003. "Pelestarian Warisan Budaya Berbasis Desa Adat" *Dinamika Kebudayaan*.
- Subramaniam. 2004. *Ilmu Pengetahuan dan Spiritual Berdasarkan Veda*. Surabaya : Paramita
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Titib, I Made, 2006. *Menumbuh Kembangkan Pendidikan Budi Pekerti Pada Anak*. Jakarta : Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Vikasa Swami, Bhakti. 2012. *Brahmacari Dalam Kesadaran Krsna*. Indonesia: Yayasan Institut Bhaktivedanta.
- Witherington. H.C. 1999. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru
- [www.google/konsep\\_implicasi.com](http://www.google/konsep_implicasi.com) (20/12:2012)
- Zubaedi, 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Pudja, G. 1999. *Bhagawad Gita*. Surabaya : Paramita.
- Purwiati, Mirah. 2010. *Kamus Budaya Bali Bidang Istilah Upakara Bali*. Jakarta : Azka Mulia Media.
- Sanjaya, 2010. *Acara Agama Hindu*. Surabaya: Paramita
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhardana, K.M. 2010. *Kerangka Dasar Agama Hindu, tattwa-susila-upacara*. Surabaya : Paramita. Tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum\\_2013](https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013)
- [http://balmarilest.blogspot.com/2011/0/struktur\\_pura\\_di\\_bali.html](http://balmarilest.blogspot.com/2011/0/struktur_pura_di_bali.html).